

Intisari

Adanya pelaksanaan pemilihan dapat memengaruhi kebijakan fiskal pemerintah. Manipulasi variabel penganggaran pada waktu pemilihan yang bertujuan untuk menarik pemilih, dikenal sebagai *political budget cycle* (PBC). PBC muncul karena adanya informasi yang asimetris sehingga menimbulkan *moral hazard* pada pemerintah. Petahana akan menggunakan instrumen kebijakan tertentu untuk memperlihatkan kemampuannya kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pemilihan gubernur terhadap alokasi anggaran belanja pemerintah (APBD) provinsi di Indonesia dan apakah ada perbedaan perilaku penganggaran pada gubernur petahana. Penelitian ini mencakup 32 provinsi yang ada di Indonesia pada rentang observasi pemilihan gubernur tahun 2010 hingga 2018 dengan menggunakan metode estimasi *two-step system* GMM. Hasil empiris menunjukkan bahwa terjadi peningkatan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial serta anggaran belanja bantuan keuangan pada tahun pelaksanaan pemilihan gubernur. Terjadi peningkatan anggaran belanja total, anggaran belanja hibah dan bantuan sosial serta anggaran belanja pegawai pada tahun menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur. Namun, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada perilaku penganggaran antara gubernur petahana yang mencalonkan diri kembali pada pemilihan periode kedua dengan gubernur petahana lainnya. Perlunya peningkatan pengawasan pada penganggaran belanja dan program pemerintah menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur serta perlunya aturan yang lebih spesifik mengenai alokasi dana hibah dan bantuan sosial.

Kata kunci: pemilihan gubernur, *political budget cycle*, APBD, *two-step system* GMM

Abstract

An election can affect government fiscal policies. Election time manipulation of budgetary variables that aims to lure the voter, known as the political budget cycle (PBC). PBC arises because of asymmetric informations that lead moral hazards to the government. The incumbent will use certain policy instruments to show his abilities to the voters. This study aims to determine the effect of the governor election on the province budget allocation and whether there are differences in budgeting behavior in the incumbent governor. Using the GMM two-step system estimation method, this study covers 32 Indonesian provinces over the periods 2010 to 2018. The empirical results show that there are significant increasing on grants and social assistance expenditures and financial aid expenditures in the election year. Moreover, there are significant increasing on total expenditures, grants and social assistance expenditures and employee expenditures in the preelection year. However, there is no significant difference in budgeting behavior between the incumbent governor whom running for reelection and others. Thus, there should an improvement on controlling government budget and program on preelection and election year. More specific rules regarding the allocation of grants and social assistance expenditures are necessary.

Keywords: election, political budget cycle, *APBD*, two-step system GMM